

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai Implementasi *Area Traffic Control System* (ATCS) di Kota Bandung, dapat diketahui bahwa **implementasi Program *Area Traffic Control System* (ATCS) di Kota Bandung masih belum terlaksana secara optimal**. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan program *Area Traffic Control System* (ATCS) di Kota Bandung masih terdapat kendala-kendala yang terjadi seperti tidak meratanya pemasangan CCTV di sejumlah simpang seperti simpang Gandok, simpang Dago, Simpang Pajajaran, dan beberapa simpang lainnya padahal CCTV merupakan aspek utama yang mendukung pelaksanaan program ATCS.

Implementasi ATCS dalam penelitian ini dianalisis berdasarkan teori dari Richard E. Matland (1995). Dari hasil penelitian, ditemukan penjelasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program ATCS di kota Bandung oleh Dinas Perhubungan, yaitu sebagai berikut.

1. Seperangkat Aturan dan Standar Operasional Prosedur

Aturan dan standar operasional prosedur dalam proses implementasi ATCS di kota Bandung mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.3262/KP.108/DRJD/2018 Tentang Kompetensi Pengelolaan Sistem Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Terkoordinasi (*Area Traffic Control System*). Adapun standar dan

operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaannya yaitu SOP tentang publikasi informasi melalui media sosial, publikasi peringkat pelanggaran melalui media sosial, pemanduan perjalanan VIP, penyusunan laporan kegiatan, penanganan kedaruratan, dan pelaporan kendala kamera dan *traffic light*.

2. Koordinasi dan Komunikasi

Terkait koordinasi dan komunikasi, dalam pelaksanaan ATCS, operator ATCS melakukan koordinasi terhadap beberapa pihak diantaranya Pihak Kepolisian, Diskominfo, dan beberapa bidang internal Dinas Perhubungan seperti Bidang Pengendalian dan Ketertiban Lalu Lintas (PDKT) serta Bidang Keselamatan dan Ketertiban Transportasi (KKT).

Sedangkan komunikasi dilakukan melalui postingan sosial media seperti instagram, twitter, tiktok, dan youtube sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat dan juga laporan-laporan kepada Bidang Manajemen Transportasi dan Parkir.

3. Teknologi Informasi

Teknologi informasi yang digunakan dalam program ATCS ini, sudah mampu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh operator ATCS. Teknologi informasi yang dimaksud yaitu CCTV yang terintegrasi dengan ruang kendali (CC-Room) yang digunakan untuk memantau kondisi lalu lintas. CCTV ini sangat mendukung pelaksanaan program

ATCS di kota Bandung dalam hal memberikan informasi pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara.

4. Efektivitas Pemantauan

Untuk efektivitas pemantauan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan terhadap unit ATCS sudah dilakukan dengan konsisten. Di mana operator ATCS akan memberikan laporan setiap harinya kepada kepala seksi untuk sebagai bahan evaluasi kepada masing-masing pegawai. Selain laporan yang disampaikan, Dinas Perhubungan juga melakukan pemantauan secara langsung dengan mendatangi CC-Room sebagai ruangan yang digunakan oleh operator ATCS untuk mengoperasikan perangkat dan sistem yang digunakan.

5. Tingkat Kepatuhan dan Pemberian Sanksi

Dalam hal kepatuhan dan pemberian sanksi, dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan program ATCS di kota Bandung setiap operator konsisten dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab mereka sesuai dengan SOP yang ada. Untuk insentif sebagai bentuk apresiasi yang diberikan kepada petugas, operator ATCS mengatakan bahwa tidak ada insentif khusus yang diberikan oleh Dinas Perhubungan karena setiap tugas dan tanggung jawab yang dilakukan merupakan salah satu tupoksi yang memang harus dilakukan oleh setiap petugas. Sedangkan untuk sanksi bagi petugas yang tidak dapat melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan SOP, akan diberikan tambahan baik itu jam kerja maupun beban kerja untuk mencapai target yang diharapkan.

6.2 Saran

Setelah memahami proses implementasi serta permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan program ATCS di kota Bandung, peneliti mencoba memberikan rekomendasi bagi pihak tim ATCS dan Dinas Perhubungan serta masyarakat untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada sebagai upaya untuk meningkatkan dampak implementasi program ATCS di kota Bandung. Rekomendasi-rekomendasi tersebut sebagai berikut.

1. Melakukan perbaikan standar operasional prosedur (SOP) terkait dengan etika penayangan pelaku pelanggaran di sosial media (instagram dan tiktok) dengan tidak menampilkan wajah sebagai bentuk perlindungan dari sanksi sosial yang kemungkinan akan diterima oleh pengendara tersebut.
2. Meningkatkan pengkomunikasian program *Area Traffic Control System* (ATCS) kepada masyarakat kota Bandung melalui kegiatan webinar, postingan sosial media di instagram, twitter, tiktok, dan youtube, serta melalui pemberitahuan langsung yang dilakukan oleh petugas di lapangan pada saat lampu merah.
3. Dinas Perhubungan perlu meningkatkan koordinasi kepada tim pelaksana ATCS melalui grup chat *whatsapp* atau secara langsung dengan menanyakan kendala-kendala teknis yang dihadapi oleh implementor sehingga dapat diselesaikan secara bersama-sama.
4. Menambah pemasangan CCTV di sejumlah titik yang belum terpasang, seperti simpang Gandok, Simpang Dago, dan Simpang Pajajaran, serta beberapa simpang lainnya sehingga persebaran CCTV di simpang-

simpang menjadi semakin merata dan pengawasan yang diberikan dapat dilakukan dengan mudah.

5. Meningkatkan pemahaman implementor terhadap tujuan pelaksanaan program secara keseluruhan keseluruhan melalui pelatihan-pelatihan atau sosialisasi kepada operator ATCS.
6. Memberikan insentif baik dalam bentuk kompensasi maupun dalam bentuk promosi jabatan untuk operator ATCS yang mampu melakukan inovasi-inovasi di luar standar operasional prosedur. Inovasi yang dimaksud yaitu gagasan baru yang mampu mendukung pelaksanaan program ATCS seperti inisiasi pembuatan video edukatif melalui youtube kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Abdoellah, A. Y., & Rusfiana, Y. (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta, Bandung. <https://doi.org/978-602-289-218-2>
- Andriana, D., & Arina Raspati, N. (2015). Pengaruh Profitabilitas Dan Kepemilikan Publik Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 675. <https://doi.org/10.17509/jrak.v3i2.6612>
- Hasan, M. I. (2002). *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Ghalia, Bogor.
- Kurniawan, J., & Salomo, R. V. (2021). Analysis of Policy Implementation on The Duties and Functions of the Cabinet Secretariat (Case Study: Function of Policy Recommendation). *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 10(1), 78. <https://doi.org/10.31314/pjia.10.1.78-95.2021>
- Matland, R. E. (1995). Synthesizing the implementation literature: The ambiguity-conflict model of policy implementation. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 5(2), 145–174. <https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.jpart.a037242>
- Nikmatur, R. (2017). Proses Penelitian, Masalah, Variabel dan Paradigma Penelitian. *Jurnal Hikmah*, 14(1), 63.
- Razak, P. R., As'ad, M. U., & Hamdie, A. N. (2020). *Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Kota Banjarmasin Kelurahan Telawang*.

Safitri, A., & Rahman, T. (2013). Tingkat Kepatuhan Hukum Siswa SMA KARTIKA IV-3 Surabaya Terhadap Etika Berlalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 3(1), 485–499.

Silalahi, U. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. PT. Refika Aditama, Bandung.

Suwitri, S. (2008). *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Weaver, R. K. (2009). Target Compliance: The Final Frontier of Policy Implementation. *Governance Studies*, 27, 1–11.
<https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.1039.6877&rep=rep1&type=pdf>

Wicaksono, K. W., & Rachmawati, T. (2015). *Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima*.
<https://journal.unpar.ac.id/index.php/Sosial/article/view/1612>

Internet

ATCS Kota Bandung. (2017). Profil Instagram ATCS Kota Bandung. Diakses melalui https://instagram.com/atcs.kotabandung?utm_medium=copy_link pada tanggal 07 Oktober 2021.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung. (2020). Jumlah Penduduk Kota Bandung. Diakses melalui <https://bandungkota.bps.go.id/> pada 29 September 2021.

Dinas Perhubungan Kota Bandung. (2022). Area Traffic Control System. Diakses melalui website http://atcs-dishub.bandung.go.id/Tentang_ATCS pada tanggal 07 Oktober 2021.

Evendy, R. (2022). Pengecekan Keabsahan Temuan dalam Penelitian Kualitatif. Racheve.com. Diakses melalui website <http://www.racheve.com/2016/05/pengecekan-keabsahan-temuan-dalam.html> pada tanggal 16 Desember 2021.

Fatmawati, S. (2021). Validitas dan Reliabilitas Penelitian Kualitatif. Akademia.edu. Diakses melalui website https://www.academia.edu/9621510/bab_14_validitas_dan_reliabilitas_penelitian_kualitatif pada tanggal 16 Desember 2021.

Ini, B. H. (2021, June 03). Kerangka Berpikir: Pengertian, Cara Membuat, dan Contohnya. Kumparan.com. Diakses melalui <https://kumparan.com/berita-hari-ini/kerangka-berpikir-pengertian-cara-membuat-dan-contohnya-1vs3Xt48y6k/full> pada tanggal 20 Desember 2021.

Iqbal, M. (2019, October 03). ADB Rilis Daftar Kota Termacet di Asia, Jakarta Nomor Berapa?. CNBC Indonesia. Diakses melalui Website <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191002203151-4-104008/adb-rilis-daftar-kota-termacet-di-asia-jakarta-nomor-berapa> pada tanggal 12 Oktober 08.45 WIB.

Prawiro, M. (2018, February 19). Pengertian Wawancara Secara Umum, Tujuan, Jenis, dan Ciri-Ciri Pewawancara. Maxmonroe.com. Diakses melalui

<https://www.maxmanroe.com/vid/karir/pengertian-wawancara.html> pada tanggal 16 Desember 2021

Ristia, E. (2019). Kepatuhan Berlalu Lintas Ditinjau Dari Sikap Terhadap Polisi dan Jenis Kelamin. Repositori Radenintan. diakses melalui website <http://repository.radenintan.ac.id/6614/1/SKRIPSI.pdf> pada tanggal 19 Desember 2021

Sarasa, A.B. (2021, March 24). 5.000 Pelanggar Lalu Lintas di Bandung Terciduk Kamera e-TLE. Okezone.com diakses melalui website <https://news.okezone.com/read/2021/03/24/525/2383352/5-000-pelanggar-lalu-lintas-di-bandung-terciduk-kamera-e-tle> pada tanggal 29 September 2021 Pukul 19.17 WIB

Syafnidawaty. (2020, November 09). Perbedaan Data Primer dan Data Sekunder. Universitas Raharja. Diakses melalui website <https://raharja.ac.id/2020/11/09/perbedaan-data-primer-dan-data-sekunder/> pada tanggal 02 Desember 2021

Zakky. (2020, April 18). Pengertian Observasi Menurut Para Ahli dan secara Umum. Zonareferensi.com. Diakses melalui website <https://www.zonareferensi.com/pengertian-observasi/> pada tanggal 16 Desember 2021

Peraturan, Undang-Undang dan Dokumen Pemerintah

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 21 Tahun 1997, Dinas Perhubungan Kota Bandung dibentuk berdasarkan Perda Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2001

tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kota Bandung.

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor:
SK.2343/KP.108/DRJD/2015 Tentang Kompetensi Pengelolaan Sistem
Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Terkoordinasi (Area Traffic Control
System).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan.